

PENELITIAN FAKTOR- FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

OLEH : Riandi -Putra. SE Ak
BPKP Perwakilan Kaltim

A. PENDAHULUAN

Meskipun ±3 tahun Inpres Nomor 7 tahun 99 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan SK LAN Nomor 589/IX/6/4/99 tentang petunjuk Penyusunan LAKIP diterapkan, namun implementasi Sistem AKIP tersebut tidaklah semulus yang diharapkan. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar instansi di lingkungan Pemerintah propinsi Kalimantan Timur misalnya belum membuat dan melaksanakan sistem AKIP. Berpijak pada kenyataan ini, ditambah masih penelitian tentang implementasi AKIP, maka diperlukanlah penelitian untuk mengetahui mengapa masih terdapat Dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur belum melaksanakan sistem AKIP, dan faktor-faktor apa saja yang sangat mempengaruhi terhambatnya implementasi sistem AKIP tersebut. Hasilnya kemudian dianalisis dan dicarikan pemecahannya.

Penelitian yang dilakukan oleh pemprop Kaltim (dalam hal ini Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah prop Kaltim) bekerja sama dengan BPKP perwakilan Prop. Kaltim itu banyak mendapat masukan dan rekomendasi berharga dari hasil penelitian yang diberikan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata dilapangan, yang pada akhirnya sangat menunjang keberhasilan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur. Hal ini terbuti adanya perbedaan yang sangat signifikan antara implementasi SAKIP di lingkungan instansi Pemprov. Kaltim sebelum dan sesudah diadakannya penelitian. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa BPKP perwakilan Kaltim siap untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan visi katalisator pembaharuan manajemen dengan pengawasan yang profesional yang diantaranya diwujudkan dengan kerjasama penelitian dengan Pemerintah Daerah

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan regresi linier Bergandayang sangat berguna untuk melihat sejauh mana pengaruh antara variabel bebas (independent) dengan Variabel tergantung (dependent) dengan memanfaatkan program SPSS versi 11.00 . Untuk pengumpulan data utama menggunakan kuisioner yang telah dirancang khusus memuat variabel-variabel bebas (X) maupun variabel tergantung(Y) dengan menggunakan skala likert (likert scale). Adapun variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Variabel tergantung (Y) adalah implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang ditandai dengan jumlah instansi yang telah menerapkan SAKIP dengan ketentuan yang berlaku.
2. Variabel bebas (X) terdiri atas 7 (Tujuh) variabel yaitu:
 - Rendahnya kesadaran tentang akuntabilitas (Low Literacy percentage)
 - Kebijakan “biarlah berlangsung “ (A Policy of Live and let die)
 - Kurangnya kemauan untuk menerapkan akuntabilitas (Lack of will in enforcing accountability)
 - Kualitas pejabat/petugas (Quality of officers)
 - Kerahasiaan Birokrasi (Birocratic Secrey)
 - Kelemahan hukum tentang akuntabilitas (Defects in the laws concerning accountability)
 - Ketidak mampuan belajar organisasi (learning disabilities)

Berdasarkan variabel diatas, kemudian ditentukan persamaan linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_n$$

Dimana :

Y = variabel Tak bebas

X1 = Nilai tempat A

X2 = Nilai ditempat B

X3 = Nilai ditempat C

α = intercept, yaitu ketika X1, X2, X3 bernilai 0

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien X1, X2, X3 dan Xn

HASIL PENELITIAN

Kuisioner yang dibagikan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 274 kuisioner yang dibagikan kepada pejabat Eselon I sebanyak 1 rewsponden, Eselon II 39 responden, Eselon III 117 responden dan Eselon IV 117

Responden. Dengan demikian sampel responden berjumlah 75,69% dari total populasi pejabat eselon sebanyak 362 orang. Dari jumlah tersebut yang kembali adalah sebanyak 206 responden atau 75,18% dari total yang dibagikan.

Berdasarkan hasil kuisioner dan pengolahan SPSS, diketahui faktor-faktor yang sangat berpengaruh pada implementasi SAKIP di lingkungan instansi Pemerintah Propinsi Kaltim adalah sebagai berikut :

1. Model Summary

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui nilai korelasi ganda (R) yaitu antara Variabel X1 sampai dengan X7 secara bersama-sama terhadap variabel Y pada *model summary* adalah sebesar 0,869, sedangkan koefisien determinasi (R^2) bernilai 0,756. Koefisien Determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan demikian diketahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 75,60%, sedangkan sisanya 24,40% dipengaruhi variabel lain yang tidak diindikasikan dalam persamaan. Dengan tingkat adjusted $R^2 = 0,601$ signifikan, nilai korelasi ganda R sebesar 0,869 menunjukkan hubungan antara variabel dependen dan independen adalah tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan faktor-faktor penghambat yang ada dalam variabel X1-X7 (Rendahnya kesadaran tentang akuntabilitas, Kebijakan “biarlah berlangsung”, Kurangnya kemauan untuk menerapkan akuntabilitas, Kualitas pejabat/petugas, Kerahasiaan Birokrasi, Kelemahan hukum tentang akuntabilitas, ketidakmampuan belajar organisasi) mempunyai hubungan yang sangat tinggi dengan variabel Y (implementasi AKIP) yaitu sebesar 75,60% sedangkan sisanya 24,40% dipengaruhi faktor lain diluar persamaan regresi.

2. ANNOVA

ANNOVA atau yang sering disebut Analisis Varian adalah suatu metoda yang membagi-bagi data eksperimen kedalam beberapa bagian, berdasarkan sumber, sebab atau faktor. Analisis ini digunakan untuk menguji signifikansi dari perbedaan dua rata-rata dari sejumlah populasi yang berbeda. Dengan menggunakan *Level of significance* 95% kita tetapkan kriteria penolakan apabila F hitung lebih besar dari tabel maka kita menolak H_0 dan menerima H_a . Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel maka kita menerima H_0 dan menolak H_a .

Berdasarkan hasil perhitungan tabel ANNOVA diketahui bahwa F hitung adalah sebesar 4,886 dengan df_1 (derajat kebebasan pembilang) 7 dan df_2 (derajat kebebasan penyebut) = 11. Dengan melihat tabel nilai kritis dari F, untuk taraf signifikansi 5% maka diperoleh F tabel adalah sebesar 3,01. Dengan demikian dapat disimpulkan F hitung lebih besar dibandingkan F tabel $4,886 > 3,01$. Atau dengan kata lain kita menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti hasil penelitian menunjukkan paling tidak terdapat pengaruh salah satu faktor penghambat (Rendahnya kesadaran tentang akuntabilitas, Kebijakan “biarlah berlangsung, kurangnya kemauan untuk menerapkan akuntabilitas, Kualitas pejabat/petugas, kerahasiaan Birokrasi, Kelemahan hukum tentang akuntabilitas, ketidakmampuan belajar organisasi) terhadap implementasi AKIP.

3. Coeficient

tabel coefficient digunakan untuk melihat variabel dependen (X) mana yang paling signifikan mempengaruhi variabel independen Y. halini sangat berguna karena variabel X sangat banyak (lebih dari tiga rediktor), sehingga walaupun secara bersama-sama nilai konstannya signifikan, tetapi belum tentu semua variabelnya signifikan. Kriteria yang digunakan untuk melihat signifikansi tersebut apabila nilai kolom signifikan pada tabel tersebut bernilai lebih kecil dari 0,05.

Berdasarkan hasil tabel Coefisient diketahui nilai Beta persamaan tersebut adalah 5,678. Nilai 5,678 adalah nilai variabel Y ketika variabel X1 sd X7 bernilai 0, artinya nilai tersebut diartikan sebagai porsi dan tingkat Y yang bervariasi menurut faktor-faktor selain variabel X1 sampai dengan X7

$$Y = 5,678 - 0,176X1 + 0,492X2 + 0,037X3 - 0,086X4 - 0,150X5 + 0,064X6 + 0,072X7$$

Dari persamaan regresi linier berganda diatas, diketahui bahwa Beta untuk variabel X1, X4 dan X5 bernilai negatif, yaitu $-0,176$ untuk X1, $-0,086$ untuk X4 serta $0,150$ untuk X5. Hal ini menunjukkan slope persamaan garis regresinya adalah negatif. Artinya hubungan antara variabel Y dengan variabel X1, X4, X5 berbanding terbalik. Sedangkan untuk variabel X2, X3, X6 dan X7 berbanding positif. Secara statistik dapat dijelaskan setiap kenaikan 1% untuk variabel X1, X3 dan X4 akan menyebabkan pengurangan nilai variabel Y sebesar 1% juga.

Dari tabel coefficient dapat diketahui variabel independen (X) yang sangat signifikan mempengaruhi variabel Y adalah Low Literacy Percentage dengan nilai signifikan sebesar $0,017$, A Policy of live and let live sebesar $0,042$, birocratic secrecy dengan nilai $0,034$, serta ketidakmampuan belajar organisasi sebesar $0,048$. Hal ini menunjukkan keempat faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap implementasi AKIP pada instansi. Sedangkan ke empat variabel lain sangat bagus dan tidak mempengaruhi implementasi AKIP karena nilainya lebih besar dari $0,05$.

Secara lebih mendalam adapun yang menyebabkan Low Literacy Percentage, adalah masih sedikitnya instansi memiliki dokumen terkait dengan AKIP serta belum adanya modul AKIP yang dikeluarkan oleh Gubernur sehingga implementasi AKIP tersebut bisa seragam diseluruh instansi.

Sedangkan yang menyebabkan A Policy of live and let die, disebabkan tingkat kehadiran pejabat dalam sosialisasi masih kurang yang bergambar dari hanya sebesar $60,71\%$ yang hadir, ditambah lagi materi sosialisasi tidak memadai untuk mereka terapkan atau aplikasikan didalam instansi masing-masing. Hanya $5,4\%$ yang mengatakan memadai dan $36,5\%$ mengatakan memadai. Selain itu sosialisasi tidak efektif karena yang ikut sosialisasi bukan pengambil keputusan, sehingga ketika mau diterapkan masing-masing instansi, kurang begitu mendapat tanggapan dari pihak yang berkompeten.

Variabel X yang sangat signifikan mempengaruhi yang lain adalah faktor Birocratic Secrey dengan nilai signifikan $0,034$, hal ini dapat ditunjukkan masih terdapat beberapa instansi yang menganggap AKIP merupakan suatu hal yang tidak boleh diakses atau diketahui oleh pihak lain, dan juga pada saat perencanaan dan pelaporan tidak diperlukan pertimbangan dari pihak diluar organisasi.

Variabel terakhir yang juga significant berpengaruh adalah faktor ketidakmampuan belajar dengan nilai signifikan sebesar $0,048$. Nilai ini nyaris tidak berpengaruh karena perbedaannya sangat tipis dengan nilai signifikan $0,05\%$ (signifikan apabila lebih kecil dari $0,05\%$). Berdasarkan hasil analisis lebih mendalam diketahui indikator ketidakmampuan belajar yang sangat signifikan adalah pada umumnya responden berpendapat bahwa ada beberapa instansi yang anggota organisasi hanya mengenali peran dan posisinya saja. Selain itu indikator lain adalah sebagian instansi masih menganggap mereka merupakan tim manajemen yang solid (mitos tim manajemen), karena terdiri dari orang-orang pintar. Padahal justru karena beranggapan demikian pada saat implementasi AKIP bukannya dilaksanakan malah adu argumentasi yang sering terjadi, sehingga malah hal pokok harus dilaksanakan tidak pernah terselesaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta didukung analisis seperti yang telah diuraikan di atas, serta memperhatikan permasalahan penelitian dan perumusan masalah, maka diambil kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Masih terdapat beberapa instansi-instansi Eselon II dilingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang belum mengimplementasikan kebijakan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAAKIP), terutama untuk penyusunan Renstra dan LAKIP yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Terdapat hubungan antara faktor penghambat implementasi akuntabilitas dengan penerapan implementasi AKIP. Dari faktor penghambat tersebut yang paling signifikan mempengaruhi implementasi AKIP adalah rendahnya kesadaran tentang akuntabilitaskebijakan “biarlah berlangsung” kerahasiaan birokrasi, serta ketidakmampuan organisasi untuk belajar.
3. Secara lebih mendalam rendahnya kesadaran tentang akuntabilitas, kebijakan “biarlah berlangsung”

lebih banyak disebabkan oleh sosialisasi dan materi sosialisasi belum memadai untuk diterapkan pada instansi yang bersangkutan selain modul yang belum representatif. Hal ini didukung data, instansi yang belum sesuai Renstra dan LAKIP nya pada umumnya belum mengikuti sosialisasi. Selain itu materi sosialisasi yang telah diikuti belum memadai untuk mereka terapkan dalam instansi masing-masing. Penyebab lain adalah yang mengikuti sosialisasi pada umumnya bukan pengambil kebijakan, sehingga hasil sosialisasi yang diikuti tidak efektif (hanya sekedar mengikuti sosialisasi saja)

4. Faktor ketidakmampuan belajar organisasi yang sangat berpengaruh adalah ada beberapa anggota organisasi hanya mengenali peran dan posisinya saja dan tidak memperhatikan kepentingan dan kebutuhan organisasi secara keseluruhan termasuk pelunya penyusunan Renstra dan lakip. Selain itu indikator lain adalah sebagian anggota organisasi masih menganggap mereka merupakan tim manajemen yang solid (mitos tim manajemen), karena terdiri dari orang-orang pintar. Sehingga kecenderungannya menganggap tidak diperlukan masukan dari diluar instansi yang berkompeten, karena mereka mampu untuk melaksanakannya.
5. Peran sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada instansi sangat bermanfaat baik dimulai dari perencanaan maupun pelaporannya.

REKOMENDASI DAN SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka diberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang sebagai berikut:

1. Agar lebih diefektifkan sosialisasi bahkan asistensi dan bimbingan teknis penyusunan Renstra dan alkip oleh instansi terkait, baik oleh Biro Organisasi Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur maupun instansi diluar lingkungan organisasi Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur seperti BPKP Kaltim, LAN, Universitas dan lain-lain.
2. Gubernur hendaknya memberikan penghargaan dan sanksi bagi yang telah berhasil maupun sanksi bagi yang belum mengimplementasikan kebijakan ini dan juga dijadikan sebagai salah satu instrumen penilaian kinerja instansi yang bersangkutan.
3. LAKIP merupakan salah satu unsur utama penilaian untuk penempatan Pejabat yang akan menduduki jabatan Eselon II dan III.